eL BIDAYAH
Journal of Islamic Elementary Education
e-ISSN: 2656-7121
Avalaible online: https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/pgmi
Article doi: https://doi.org/10.33367/jiee.v5i1.3655
Submission: 2023-3-30 Review: 2023-3-30 Revision: 2023-3-30 Accepted: 2023-3-30

Akuntabilitas dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah (Studi Peningkatan Kepercayaan Publik di MI Ulul Albab Plesungan, Kapas, Bojonegoro)

Accountability and Quality of Islamic Elementary Education (Study on Increasing Public Trust at MI Ulul Albab Plesungan, Kapas, Bojonegoro)

Laily Qomariyatin
DPK Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro
lailyqomariyatin@gmail.com

Abstract

Madrasa problems that affect quality education is the implementation of the principle of accountability. Protracted errors will reduce quality. In the end it will have an impact on public or community trust. In this context, the implementation of the accountability principle of Islamic Elementary Ulul Albab Plesungan, Kapas, Bojonegoro looks very good. It has been proven that in the past year it has received very good accreditation. In order to explore these advantages, researchers conducted this research using in-depth interviews, observation and document studies. As a result, the existence of good accountability will also improve good financial management, so that in the end it will improve the performance of madrasas. The madrasah is the executor and works based on the trust of the party that gives authority, in this case the government, by using funds obtained from the community. Society wants accountability in terms of financial management. This accountability is also a form of oversight of the use of funds by the madrasah, besides that it also shows that the madrasah has confidence that what has been done is the right thing and there are no deviations from the applicable provisions.

Keywords: *Implementation of Accountability, Madrasah Quality, Public Trust*

Abstrak

Permasalahan madrasah yang berpengaruh terhadap mutu pendidikan adalah implementasi prinsip akuntabilitas. Permasalahan yang berlarut-larut akan menurunkan mutu. Pada akhirnya akan berdampak pada kepercayaan publik atau masyarakat. Dalam konteks ini, penyelenggaraan prinsip akuntabilitas MI Ulul Albab Plesungan, Kapas, Bojonegoro terlihat sangat baik. Terbukti dalam satu tahun terakhir mendapatkan akreditasi sangat baik. Guna mendalami keunggulan tersebut, peneliti melakukan penelitian ini menggunakan penelitian wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Hasilnya, Adanya

akuntabilitas yang baik dari akan meningkatkan pengelolaan keuangan yang baik pula, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kinerja madrasah. Pihak madrasah adalah sebagai pelaksana dan bekerja berdasarkan kepercayaan dari pihak yang memberikan wewenang dalam hal ini pemerintah dengan menggunakan dana yang diperoleh dari masyarakat. Masyarakat menginginkan adanya akuntabilitas dalam hal pengelolaan keuangan. Akuntabilitas ini juga merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap penggunaan dana oleh pihak madrasah, selain itu juga menunjukkan bahwa madrasah memiliki kepercayaan diri bahwa apa yang telah dilakukan adalah hal yang benar dan tidak ada penyimpangan dari ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Implementasi Akuntabilitas, Mutu Madrasah, Kepercayaan Publik

Pendahuluan

Permasalahan pendidikan Islam khususnya madrasah sampai hari ini masih banyak mengalami banyak permasalahan yang kompleks. Salah satu permasalahan pendidikan yang tidak ringan dan dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pada setiap jenjang dan satu pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah.[1] Bahkan lebih naif lagi, madrasah diposisikan pada posisi yang terendah di antara lembaga-lembaga pendidikan yang mempunyai kualitas rendah tersebut yaitu sekolah negeri dan sekolah Kristen.[2]

Rendahnya mutu pendidikan tersebut dapat diperhatikan pada hasil riset internasional yang selalu menempatkan pendidikan Indonesia dalam posisi 'juru kunci'.[3] Hasil studi the third international mathematics and science study repeat 1999 (TIMSSS-R 1999) yang dilaksanakan pada 38 negara dari lima benua yaitu asia, australia, afrika, amerika dan eropa, menempatkan peserta didik SLTP pada urutan 32 dan 34 untuk skor tres matematika dan IPA. Indikator lain menunjukan bahwa berdasarkan pada Human Development Index (HDI), Indonesia berada pada urutan yang ke 102 dari 164 negara dan indonesia masih berada di bawah Vietnam.[4] Di samping itu, hasil studi *internasional institute for development* menempatkan Indonesia pada urutan ke 49 dari 49 negara.[5]

---

[1] Muhaimin.2005. Pengemabngan Kurikulum Pendidikan Islam: di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi, Jakarta: Rajawali pers, h 189-190

[2] Syafarudin (2002). Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan Konsep, Strategi Dan Aplikasi, Jakarta: Grasindo

[3] Ristya Dwi Anggraini. 2013. Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS dalam Program RKAS di SDN Pancarkeling VIII Surabaya. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 1 No. 2 Mei – Agustus 2013. Universitas Airlangga. Surabaya.

[4] Indana, Nurul. "Penerapan Kurikulum Terintegrasi Dalam Mengembangkan Mutu Belajar Siswa (Studi Kasus Di Sma Darul 'Ulum 1 Unggulan Bppt Jombang)." Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 3, no. 2 (2018): 121–147

[5] Muliati, Muliati, and Zainal Arifin. "Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Sekolah di SMA Negeri 11 Makassar." Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran,

Data hasil riset tersebut di atas memberi informasi kepada khalayak bahwa pendidikan nasional harus diberi perhatian ekstra agar kualitasnya bisa meningkat yang kemudian berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia sebagai produk pendidikan. Pendidikan nasional harus berbenah sesuai dengan dinamika zaman yang menghendaki segala sesuatu terukur, transparan dan akuntabel.[6] Pemerintah sebagai stakeholder utama dalam hal pendidikan harus memiliki grand design dalam membenahi pendidikan agar supaya ada peningkatan mutu termasuk di dalamnya madrasah yang kurang dapat perhatian. Kualitas pendidikan masih menyisakan banyak masalah yang perlu perhatian semua pihak dan kemauan politik pemerintah untuk membelanjakan 20% dari total APBN untuk anggaran pendidikan.[7]

Permasalahan keuangan pendidikan yang paling urgen juga terkait dengan bagaimana sekolah menerapkan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas pendidikan bisa diartikan sebagai sebuah pertanggungjawaban lembaga pendidikan sekolah maupun madrasah dalam mencapai tujuan pendidikan.[8] Adapun akuntabilitas pendidikan menurut Siti Irene, bahwa akuntabilitas dalam lembaga pendidikan lebih komplek karena dalam penerapan nya akunta-bilitas harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari kurikulum, manajemen yang berkomit-men untuk mewujudkan keunggulan sekolah. Oleh karena itu akuntabilitas pendidikan harus konsisten dalam penerapannya sehingga diperlukan aturan yang jelas sehingga bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.[9]

Dalam dunia pendidikan, penerapan akuntabilitas mampu mendorong perbaikan mutu secara signifikan.[10] Dengan adanya akuntabilitas pendidikan, pada dasarnya masyarakat boleh ikut mengawasi dan mengontrol kinerja sekolah sudah sejauh mana sekolah tersebut berada di track yang benar sehingga apabila terjadi masalah atau penyimpangan bisa segera diketahui dan semestinya masyarakat boleh

Penelitian Dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan 0, no. 0 (July 18, 2018): 77–80. https://doi.org/10.26858/sosialisasi.v0i0.12237.

[6] Hendarman, 2013, Pemanfaatan Hasil Akreditasi dan Kredibilitas Asesor Sekolah/Madrasah, Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud. URL:http://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/download/308/210.

[7] Bintoro Tjokroamidjojo (2003). Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance Dan Perwujudan Masyarakat Madani, Jakarta; Lembaga Administrasi Nasional, h. 21

[8] Zainuddin, Reformasi Pendidikan: Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. I, 2008), h. 71. Baca juga H.A.R. Tilaar, Membenahi Pendidikan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, cet. I, 2002), h. 76-77. Bandingkan dengan Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 3.

[9] Irene Astuti, "Isu-Isu Akuntabilitas Sekolah Dan Pengembangannya," 2012.

[10] Haryono, Haryono, Budiyono Budiyono, Istyarini Istyarini, Wardi Wardi, and Apri Ardiantoro. 2019. "Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang". Jurnal Panjar: Pengabdian Bidang Pembelajaran 1 (1), 17-22. https://doi.org/10.15294/panjar.v1i1.28463.

menegur atau memberi masukan yang konstruktif untuk perbaikan institusi.[11] Salah satu unsur akuntabilitas pendidikan adalah transparansi, dengan transparansi inilah diharapkan legitimasi sekolah akan naik di hadapan masyarakat atau sekolah lain. Memembangun kesan positif sekolah dihadapan stakeholder merupakan langkah strategis dalam meningkatkan mutu sekolah serta layanan pendidikan lainnya.[12]

Mutu atau kualitas saat sekarang ini menjadi brand yang banyak dibicarakan banyak orang dan menjadi kartu truf bagi lembaga pendidikan. Dengan demikian, mutu menjadi kata kunci agar lembaga pendidikan agar tetap bisa survive di tengah kepungan tawaran lembaga pendidikan berorientasi pra-ktis seperti lembaga kursus dan sejenis-nya yang justru bisa mengantarkan lulusan cepat memperoleh pekerjaan.[13]

Dalam penelitian Eli Sholihat dan Toto Sugiharto yang ditulis dalam Jurnal Ekonomi Bisnis, "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Pendidikan Terhadap Partisipasi Orang tua Murid di SMAN 107 Jakarta" hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menerapkan akuntabilitas pendidikan membawa pengaruh kuat sehingga menarik minat para orang tua peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan pendidikan.[14]

Sedangkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hafidz Aditya Pradesa dkk, dalam Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, "Menilai risiko dari organisasi yang bertransformasi: pelajaran terbaik untuk penguatan akuntabilitas pendidikan tinggi di Indonesia" menunjukkan bahwa pentingnya melakukan review dan perbaikan kurikulum serta melakukan kerjasama dalam pengembangan kurikulum dengan pihak eksternal dalam penguatan akuntabilitas pendidikan.[15]

Berdasarkan pembacaan tersebut, penelitian ini mendalami tentang implementasi prinsip akuntabilitas guna meningkatkan mutu lembaga. Penelitian ini dilakukan di MI Ulul Albab Plesungan, Kapas, Bojonegoro yang merupakan lembaga pendidikan dengan perkembangan mutu yang sangat cepat. Terbukti dengan akreditasinya sangat baik.

Metode

Penelitian ini menggunakan pen-Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan desain penelitian yang menitikberatkan pada pendekatan data dan diuraikan deskriptif melalui kata

[11] Jerome S.Arcaro (2007). Pendidikan berbasis mutu prinsip perumusan dan tata langkah penerapan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

[12] Sulistyorini & Fathurrohman (2012). Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam, Yogyakarta: Teras

[13] Amin Wijaya (1992). Audit mutu (quality auditing), Jakarta: Rineka Cipta, h 2

[14] Toto Sugiharto Sholihat Eli, "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan Terhadap Partisipasi Orang Tua Murid Di SMA Negeri 107 Jakarta," *Jurnal Ekonomi Bisnis* No. 2 Vol. (2009).

[15] Ramdani Priatna Pradesa Hafid Aditya , Caesar Oktoviandy Purba, "Menilai Risiko Dari Organisasi Yang Bertransformasi: Pelajaran Terbaik Untuk Penguatan Akuntabilitas Pendidikan Tinggi Di Indonesia," *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* Volume 9, (2021).

ataupun kalimat yang disusun secara sistematis mulai dari menghimpun data, menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian.[16] Instrumen wawancara pada penelitian ini adalah 1) apa usaha yang dilakukan oleh madrasah agar lembaganya akuntabel 2) bagaimana partisipasi orang tua dalam pengelolaan pendidikan di MI Ulul Albab Plesungan 3) bagaimana dengan output/ lulusan di MI Ulul Albab Plesungan 4) bagaimana keadaan siswa di MI Ulul Albab Plesungan Subjek penelitiannya adalah tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan orang tua peserta didik. Sedangkan penelitian ini dilaksanakan di MI Ulul Albab Plesungan Kec Kapas Kab Bojonegoro. Tehnik pengumpulan data adalah dengan tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data adalah dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan berdasarkan model Miles dan Huberman yaitu dengan langkah-langkah 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, 4) membandingkan data dan 5) pengambilan kesimpulan.[17]

Temuan dan Pembahasan

Temuan penelitian

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Zamroni mendefinisikan akuntabilitas is the degree to which local governments have to explain or justify what they have done or failed to do. Lebih lanjut dikemukakan bahwa Accountability can be seen as validation of participation, in that the test of whether attempts to increase participation prove successful is the extent to which people can use participation to hold a local government responsible for its action. Pendapat Zamroni mengenai akuntabilitas dikaitkan dengan partisipasi. Ini berarti akuntabilitas hanya dapat terjadi jika ada partisipasi dari stakeholders sekolah.[18]

Semakin kecil partisipasi stakeholders dalam penyelenggaraan manajemen sekolah, maka akan semakin rendah pula akuntabilitas sekolah. Asian Development Bank menegaskan adanya konsensus umum bahwa good governance dilandasi oleh 4 pilar yaitu (1) akuntabilitas, (2) transparansi, (3) dapat diprediksi, dan (4) partisipasi.[19] Jelas bahwa jumlah komponen atau pun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance, yaitu (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi, dan (3) Partisipasi Masyarakat.

[16] Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta., 2018).

[17] Ibid.

[18] Eli Solihat dan Toto Sugiharto. 2009. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan terhadap Partisipasi Orang Tua Murid di SMA Negeri 107 Jakarta. Jurnal Ekonomi dan Bisnis No. 2 Vol. 14 Agusutus 2009. Download Portal Garuda.

[19] Sofyani, Hafiez and Akbar, Rusdi (2013) "Hubungan Faktor Internal Institusi Dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Di Pemerintah Daerah," Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia: Vol. 10: Iss. 2, Article 4. DOI: 10.21002/jaki.2013.10
Available at:
https://scholarhub.ui.ac.id/jaki/vol10/iss2/4

Ketiga prinsip tersebut di atas tidaklah dapat berjalan sendiri-sendiri, ada hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi, masing-masing adalah instrumen yang diperlukan untuk mencapai prinsip yang lainnya, dan ketiganya adalah instrumen yang diperlukan untuk mencapai manajemen publik yang baik. Walaupun begitu, akuntabilitas menjadi kunci dari semua prinsip ini. Prinsip ini menuntut dua hal yaitu (1) kemampuan menjawab *(answerability),* dan (2) konsekuensi *(consequences).* Komponen pertama (istilah yang bermula dari *responsibilitas)* adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.[20]

Guy Peter menyebutkan adanya 3 tipe akuntabilitas yaitu: (1) akuntabilitas keuangan, (2) akuntabilitas administratif, dan (3) akuntabilitas kebijakan publik. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.[21] Pengambilan keputusan didalam organisasi-organisasi publik melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, wajar apabila rumusan kebijakan merupakan hasil kesepakatan antara warga pemilih *(constituency)* para pimpinan politik, teknokrat, birokrat atau administrator, serta para pelaksana di lapangan. Sedangkan dalam bidang politik, yang juga berhubungan dengan masyarakat secara umum, akuntabilitas didefinisikan sebagai mekanisme penggantian pejabat atau penguasa, tidak ada usaha untuk membangun monoloyalitas secara sistematis, serta ada definisi dan penanganan yang jelas terhadap pelanggaran kekuasaan dibawah rule of law.[22]

Akuntabilitas yang tinggi hanya dapat dicapai dengan pengelolaan sumber daya sekolah secara efektif dan efisien. Akuntabilitas tidak datang dengan sendiri setelah lembaga-lembaga pendidikan melaksanakan usaha-usahanya. Tiga hal yang berkaitan dalam lembaga pendidikan adalah kompetensi, akreditasi dan akuntabilitas.[23] Seorang lulusan yang memenuhi syarat dan sudah memiliki kompetensi sesuai dengan yang disyaratkan oleh lembaga pendidikan akan berhak memperoleh sertifikat. Lembaga pendidikan yang dapat menjamin mutu lulusan yang dihasilkan disebut sebagai lembaga pendidikan yang sudah terakreditasi. Lembaga pendidikan dikatakan akuntabel jika dapat menjaga mutunya dan dapat menghasilkan lulusan yang bermutu.

Secara garis besar konseptual akuntabilitas dalam penelitian ini ada-

[20] Ristya Dwi Anggraini. 2013. Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS dalam Program RKAS di SDN Pancarkeling VIII Surabaya. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 1 No. 2 Mei – Agustus 2013. Universitas Airlangga. Surabaya

[21] DiMaggio, P. J., and W. W. Powell. 1983. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. Dalam W. W. Powell and P. J. DiMaggio (editor). The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago: The University of Chicago Press.

[22] Julnes, P. L. and M. Holzer. 2001. Promoting the Utilization of Performance Measures in Public Organization: An Empirical Study of Factors Affecting Adoption and Implementation. Public Administration Review, 61 (6), 693–708.

[23] Smith, P. 1993. Outcome-Related Performance Indicators and Organizational Control in the Public Sector. British Journal of Management, 4, 135–151.

lah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Indikator pada penelitian ini adalah:

1. Kualitas penyusunan APBM (Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah).
2. Yang menjadi perhatian adalah dalam ketepatan waktu penyusunan APBM dan kemampuan APBM untuk mengakomodir kepentingan seluruh warga madrasah.
3. Laporan keuangan periodik dan pertanggungjawaban tahunan
4. Partisipasi stakeholders dalam menciptakan akuntabilitas

Akuntabilitas secara keseluruhan.[24]

Pembahasan

Hasil dari penelitian ini tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh madrasah agar semua program bisa dipertanggungjawabkan adalah kepala madrasah memaksimalkan fungsi dan perannya dalam memimpin madrasah. Semua program dan kegiatan direncanakan dengan matang, dilaksanakan sesuai acuan, dan di evaluasi pada akhir pelaksanaan.

Hal tersebut bisa dilihat dari rutinitas MI Ulul Albab Plesungan setiap tahunnya sebelum tahun pelajaran baru dimulai, selalu dilaksanakan mulai dari pembentukan Tim Pengembang Kurikulum yang nanti bekerja mereview kurikulum dengan memasukkan seluruh program madrasah ke dalamnya sehingga kurikulum madrasah ini benar-benar menjadi acuan dan pedoman seluruh aktivitas dan kegiatan yang dilakukan di madrasah. Sehingga dalam setiap pelaksanaan bisa dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.

Semisal di dalam Kurikulum MI Ulul Albab Plesungan pada bagian Program Pengembangan Diri Tidak Terprogram ini tetap dituangkan dalam kurikulumnya, ini dimaksudkan agar aktivitas ini tetap dilaksanakan dan bisa dievaluasi.

Tabel 1 Program Pengembangan Diri Tak Terprogram MI Ulul Albab Plesungan

Kegiatan	Pelaksanaan
Rutin	• Melaksanakan SOP masuk Madrasah dengan guru yang menyambut di pintu gerbang • Baca Al Qur'an sebelum memulai pembelajaran • Sholat Dhuha • Shalat dzuhur • Gerakan Literasi Madrasah • Santunan Yatim, Piatu dan Dhuafa • Peringatan Hari Besar Islam • Infak hari Jum'at • Melaksanakan jadwal piket • Silaturahmi ke rumah pengurus Yayasan dan bpk ibu guru ketika Idul Fitri

[24] Sholihin, M. dan D. Ratmono. 2013. Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0 untuk Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis. Yogyakarta: Penerbit Andi

Kegiatan	Pelaksanaan
Spontan/ pembia-saan	• Salam, Senyum, Sapa, Sopan, Santun • Cium tangan guru • Membuang sampah pada tempatnya • Meletakkan sepatu pada tempatnya • Infak spontanitas ketika ada yang membutuhkan • Besuk teman dan guru yang sakit • Takziyah

Sebelum masuk tahun ajaran baru kepala madrasah bersama Tim Pengembang Kurikulum selalu melaksanakan tugasnya dengan mempersiapkan segala sesuatunya agar pelaksanaan seluruh aktivitas di madrasah terprogram dengan baik dan itu dituangkan dalam kurikulum madrasah yang sebelumnya mengevaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya. Seperti dalam penelitian sebelumnya oleh Nasarudin dkk 2020, menunjukkan bahwa setiap keputusan harus dibuat secara tertulis yang disesuaikan dengan kebutuhan, berdasarkan etika dan standar yang berlaku untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan madrasah.[25] Hal ini bisa dikatakan bahwa akuntabel pendidikan itu sangat diperlukan agar mutu layanan dan mutu output terjaga sehingga reputasi madrasah naik kelas dan itu mematahkan asumsi bahwa madrasah sebagai lembaga pendidikan kelas kedua setelah sekolah. [26]

Pengelolaan pendidikan tentu sangat membutuhkan jalinan kerjasama yang baik antar semua pihak diantaranya adalah partisipasi orang tua siswa di dalamnya. MI Ulul Albab Plesungan selain mendayagunakan komite madrasah, juga mengajak semua orang tua untuk aktif dalam kegiatan di paguyuban parenting kelas masing-masing dan di mega parenting. Dalam program ini seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan semua orang tua siswa dilibatkan guru hanya sebagai pendamping. Sehingga mereka bisa mengetahui bagaimana suka dukanya menjalankan sebuah program untuk kepentingan bersama.

Seperti yang disampaikan salah seorang pengurus paguyuban parenting kelas mengutip dari sambutan kepala madrasah dalam kegiatan mega parenting bahwa program ini dilaksanakan agar terjalin hubungan yang baik antara wali kelas dan wali murid juga antara wali murid dengan wali murid. Karena kalau hanya tergabung dalam grup WA tanpa ada tatap muka dikhawatirkan ada kesalahpahaman dalam memahami setiap kalimat yang sering terjadi dalam sebuah grup. Dan juga agar antara wali kelas dan wali murid ada komunikasi secara langsung tentang perkembangan putra-putrinya. Sehingga wali murid tidak khawatir dan mengetahui bahwa

[25] Masayu Nadya Ardelya Kesumah Nazarudin, Kris Setyaningsih, "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada Pembiayaan Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan Di Madrasah Aliyah Paradigma Palembang," *Adaara, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 10, No 2 A (2020).

[26] Maryono Maryono, "Akuntabilitas Sekolah; Suatu Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah," *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1 (2018): 29–41, https://doi.org/10.32699/paramurobi.v1i1.176.

semua anak diperlakukan sama oleh guru mereka. Dan hal ini semakin membuat wali murid giat aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan di madrasah. Kegiatan ini rutin dilaksanakan satu bulan sekali dan presensi kehadiran tidak mengalami penurunan.

Tabel 2 Rekapitulasi Kehadiran Orang Tua Siswa dalam Kegiatan Parenting Kelas Bulan Oktober 2022

No	Kelas	Jumlah Siswa	Kehadiran		Keterangan Ketidak hadiran
			Hadir	Tidak Hadir	
1	1A	21	19	2	2 bekerja
2	1B	21	19	2	2 ijin
3	1C	22	19	3	3 bekerja
4	2A	24	20	4	1 bekerja 3 ijin
5	2B	23	21	2	1 bekerja 1ijin
6	3A	21	16	5	3 bekerja 2 ijin
7	3B	21	17	4	4 bekerja
8	4A	24	18	6	2 bekerja 4 ijin
9	4B	24	17	7	5 bekerja 2 ijin
10	5A	22	17	5	5 bekerja
11	5B	21	19	3	2 bekerja 1 ijin
12	6A	19	12	7	4 bekerja 3 ijin
13	6B	19	13	6	3 bekerja 3 ijin

Menurut Elli Sholihat dan Toto Sugiharto dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa dalam mengembangkan kualitas pendidikan peran dan partisipasi orang tua siswa dinilai sangat penting.[27] Diantara usaha sekolah untuk meningkatkan partisipasi orangtua siswa dalam mengelola pendidikan, adalah melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

Jadi transparansi dalam kegiatan parenting kelas maupun mega parenting di MI Ulul Albab Plesungan ditunjukkan bahwa urusan keuangan dipegang dan dikelola sepenuhnya oleh orang tua siswa yang menjadi pengurus. Juga dari kegiatan tersebut ada laporan perkembangan setiap siswa secara langsung disampaikan bersama maupun secara individu dengan akuntabel.

Sekolah atau madrasah dikatakan berkualitas dan bermutu apabila sekolah maupun madrasah mampu mewujudkan visi, misi dan tujuan lembaganya.[28] Menurut Maryono bahwa menyelenggarakan pendidikan berarti mengolah didalamnya ada input, proses dan output pendidikan menjadi kesatuan sistem yang bermuara kepada suatu konsep besar pendidikan nasional[29].

Di MI Ulul Albab Plesungan output atau lulusannya pencapaian kompetensinya didasarkan pada visi misi dan tujuan madrasah yang tertuang dalam kurikulum madrasah. Visi MI Ulul Albab Plesungan adalah terwujudnya peserta didik yang berilmu, beriman, berbangsa, berakhlakul ahlussunnah wal jama'ah dan berwawasan global. Dari sini pula kemudian segala aktivitas dan program selalu disasarkan untuk mencapai visi misi dan tujuan madrasah

[27] Sholihat Eli, "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan Terhadap Partisipasi Orang Tua Murid Di SMA Negeri 107 Jakarta."

[28] Susanti Evi, "Akuntabilitas Pengelolaan Sarana Pendidikan," *Manajer Pendidikan,* 11. No 3, (2017).

[29] Maryono, "Akuntabilitas Sekolah; Suatu Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah."

termasuk juga program pengembangan diri dan ekstrakurikuler.

Dari program pengembangan diri ini menunjukkan bahwa program didasarkan pada visi misi dan tujuan madrasah dan pelaksana kegiatan bekerja sesuai dengan job description masing-masing. Menurut Hafid Aditya dkk [30]mengemukakan bahwa daya tarik penawaran program salah satu pilarnya adalah bagaimana kurikulumnya karena dari sana masyarakat akan tahu program apa yang ditawarkan dan dijual. Akuntabilitas pada isi kurikulum bisa terukur dari berbagai jenis kegiatan seperti: Supervisi Akademik, PKG, Penilaian Pembelajaran dengan raport dan mungkin dengan sertifikat ketuntasan (syahadah hafalan).

Akuntabilitas pendidikan merupakan kunci sukses dalam memenangkan persaingan di dunia pendidikan, seperti yang disampaikan Sunu Trihantoyo.[31] Dari penerapan akuntabilitas pendidikan maka mutu dan kualitas terjaga dan semakin meningkat. Dampak positifnya adalah disamping berbagai prestasi didapat tapi juga pada Penerimaan Peserta Didik Baru juga mengalami peningkatan jumlah siswa. Hal ini bisa dilihat dari grafik dibawah ini.

Tabel 3 Grafik Keadaan Siswa MI Ulul Albab Plesungan Tahun Pelajaran 2016-2017 sampai dengan 2021-2022

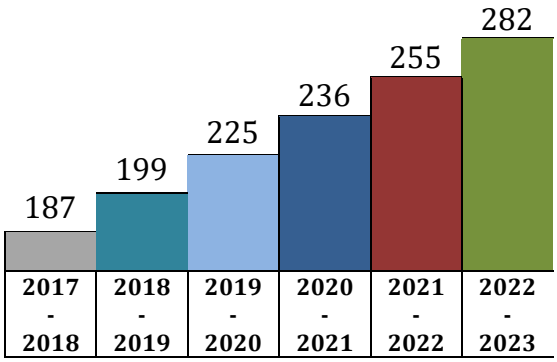

Sedangkan dari dokumentasi juga diperoleh data bahwa prestasi peserta juga selalu ada setiap tahunnya, ini bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

NO	JENIS KOMPETISI	TINGKAT	TAHUN	JUMLAH MEDALI
1	Olimpiade Sains Kuark	Kabupaten	2020	3
2	Kompetisi Sains Madrasah	Kabupaten	2021	2
3	Olimpiade Sains dan IT	Kabupaten	2021	1
4	Seni Kaligrafi	Kecamatan	2021	1
5	Porseni KKMI Kec. Kapas	Kecamatan	2021	4
6	Olimpiade Matematika	Kabupaten	2021	1
7	Porsadin	Kecamatan	2021	8

[30] Pradesa Hafid Aditya , Caesar Oktoviandy Purba, "Menilai Risiko Dari Organisasi Yang Bertransformasi: Pelajaran Terbaik Untuk Penguatan Akuntabilitas Pendidikan Tinggi Di Indonesia."

[31] Trihantoyo Syunu, "Manajemen Sekolah Dasar Berbasis Akuntabilitas Kinerja," *Widyagogik,* Vol. 3 No. (2015).

8	Pra-muka	Kecamatan	2022	1
9	Jelajah Santri Sako Pra-muka Ma'arif NU Jatim	Propinsi	2022	3
10	Jelajah Santri Sako Pramu ka Ma'arif NU Bojone goro	Kabupaten	2022	10
11	Seni Kali-grafi	Kabupaten	2022	2

Dari dua tabel diatas dapat dilihat bahwa dengan akuntabilitas yang ada di MI Ulul Albab Plesungan maka hal tersebut telah membawa peningkatan pada perolehan prestasi siswa dan otomatis mutu pendidikan juga bisa dikatakan meningkat sehingga menambah kepercayaan masyarakat lalu mereka tertarik untuk memasukkan anaknya guna menempuh pendidikan di MI Ulul Albab Plesungan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa mengimplementasikan akuntabilitas pendidikan itu bisa dilakukan dengan mereview kurikulum dan merencanakan seluruh kegiatan dengan tertulis sehingga bisa menjadi acuan bagi warga madrasah dan bisa dievaluasi dan diukur keberhasilannya. Selain itu juga minat orang tua siswa untuk berpartisipasi aktif terlibat dalam pengelolaan pendidikan akan semakin bersemangat karena pengelolaan yang akuntabel. Pada akhirnya, madrasah memiliki kepercayaan diri bahwa apa yang telah dilakukan adalah hal yang benar dan tidak ada penyimpangan dari ketentuan yang berlaku dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sangat tinggi.

Daftar Pustaka

Amin Wijaya (1992). Audit mutu (quality auditing), Jakarta: Rineka Cipta,

Bintoro Tjokroamidjojo (2003). Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance Dan Perwujudan Masyarakat Madani, Jakarta; Lembaga Administrasi Nasional

DiMaggio, P. J., and W. W. Powell. 1983. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. Dalam W. W. Powell and P. J. DiMaggio (editor). The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago: The University of Chicago Press

Eli Solihat dan Toto Sugiharto. 2009. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan terhadap Partisipasi Orang Tua Murid di SMA Negeri 107 Jakarta. Jurnal Ekonomi dan Bisnis No. 2 Vol. 14 Agusutus 2009. Download Portal Garuda

Haryono, Haryono, Budiyono Budiyono, Istyarini Istyarini, Wardi Wardi, and Apri Ardiantoro. 2019. "Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang". Jurnal Panjar: Pengabdian Bidang

Pembelajaran 1 (1), 17-22. https://doi.org/10.15294/panjar.v1i1.28463

Hendarman, 2013, Pemanfaatan Hasil Akreditasi dan Kredibilitas Asesor Sekolah/Madrasah, Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud. URL:http://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id

Irene Astuti, "Isu-Isu Akuntabilitas Sekolah Dan Pengembangannya," 2012

Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta., 2018)

Indana, Nurul. "Penerapan Kurikulum Terintegrasi Dalam Mengembangkan Mutu Belajar Siswa (Studi Kasus Di Sma Darul 'Ulum 1 Unggulan Bppt Jombang)." Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 3, no. 2 (2018): 121–147

Irene Astuti, "Isu-Isu Akuntabilitas Sekolah Dan Pengembangannya," 2012.

Jerome S.Arcaro (2007). Pendidikan berbasis mutu prinsip perumusan dan tata langkah penerapan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Julnes, P. L. and M. Holzer. 2001. Promoting the Utilization of Performance Measures in Public Organization: An Empirical Study of Factors Affecting Adoption and Implementation. Public Administration Review, 61 (6), 693–708

Masayu Nadya Ardelya Kesumah Nazarudin, Kris Setyaningsih, "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada Pembiayaan Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan Di Madrasah Aliyah Paradigma Palembang," *Adaara, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 10, No 2 A (2020).

Maryono Maryono, "Akuntabilitas Sekolah; Suatu Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah," *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1 (2018): 29–41, https://doi.org/10.32699/paramurobi.v1i1.176.

Muhaimin.2005. Pengemabngan Kurikulum Pendidikan Islam: di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi, Jakarta: Rajawali pers,

Muliati, Muliati, and Zainal Arifin. "Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Sekolah di SMA Negeri 11 Makassar." Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian Dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan 0, no. 0 (July 18, 2018): 77–80. https://doi.org/10.26858/sosialisasi.v0i0.12237

Pradesa Hafid Aditya , Caesar Oktoviandy Purba, "Menilai Risiko Dari Organisasi Yang Bertransformasi: Pelajaran Terbaik Untuk Penguatan Akuntabilitas Pendidikan Tinggi Di Indonesia."

Ramdani Priatna Pradesa Hafid Aditya , Caesar Oktoviandy Purba, "Menilai Risiko Dari Organisasi Yang Bertransformasi: Pelajaran Terbaik Untuk Penguatan Akuntabilitas Pendidikan Tinggi Di Indonesia," *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* Volume 9, (2021)

Ristya Dwi Anggraini. 2013. Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS dalam Program RKAS di SDN

Pancarkeling VIII Surabaya. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 1 No. 2 Mei – Agustus 2013. Universitas Airlangga. Surabaya

Ristya Dwi Anggraini. 2013. Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS dalam Program RKAS di SDN Pancarkeling VIII Surabaya. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 1 No. 2 Mei – Agustus 2013. Universitas Airlangga. Surabaya

Syafarudin (2002). Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan Konsep, Strategi Dan Aplikasi, Jakarta: Grasindo

Sofyani, Hafiez and Akbar, Rusdi (2013) "Hubungan Faktor Internal Institusi Dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Di Pemerintah Daerah," Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia: Vol. 10: Iss. 2, Article 4. DOI: 10.21002/jaki.2013.10 Available at: https://scholarhub.ui.ac.id/jaki/vol10/iss2/4

Smith, P. 1993. Outcome-Related Performance Indicators and Organizational Control in the Public Sector. British Journal of Management, 4, 135–151

Susanti Evi, "Akuntabilitas Pengelolaan Sarana Pendidikan," *Manajer Pendidikan,* 11. No 3, (2017).

Sholihin, M. dan D. Ratmono. 2013. Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0 untuk Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis. Yogyakarta: Penerbit Andi

Sholihat Eli, "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan Terhadap Partisipasi Orang Tua Murid Di SMA Negeri 107 Jakarta."

Sulistyorini & Fathurrohman (2012). Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam, Yogyakarta: Teras

Toto Sugiharto Sholihat Eli, "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan Terhadap Partisipasi Orang Tua Murid Di SMA Negeri 107 Jakarta," *Jurnal Ekonomi Bisnis* No. 2 Vol. (2009)

Trihantoyo Syunu, "Manajemen Sekolah Dasar Berbasis Akuntabilitas Kinerja," *Widyagogik,* Vol. 3 No. (2015)

Zainuddin, Reformasi Pendidikan: Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. I, 2008), h. 71. Baca juga H.A.R. Tilaar, Membenahi Pendidikan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, cet. I, 2002), h. 76-77. Bandingkan dengan Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007)